

Dampak Variabel Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

M Edi Saputra^{1*}, Susilowati²

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta

¹*m.edisaputra2211@gmail.com, ²susijaya7890@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

25 Sept 2023

Diterima:

04 Okt 2023

Diterbitkan:

08 Okt 2023

Kata Kunci:

Kebijakan Fiskal,
Pertumbuhan Ekonomi,
Pengukuran,

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah, dan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, bahkan di tingkat kabupaten/kota, menjadi isu strategis dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebagai output produktivitas regional dan mengatasi masalah-masalah penelitian khusus, baik pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah (PAD), pengeluaran langsung pemerintah, dana perimbangan, maupun pengaruh partisipasi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini. Lingkup penelitian ini mencakup kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2015-2020. Data panel dianalisis menggunakan metode *General Moment Method* (GMM). Hasil pengolahan data panel di 487 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dan pengeluaran langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia masih memerlukan kebijakan ekspansif. Selanjutnya, peneliti tidak menemukan bukti empiris dari pengaruh pertumbuhan PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat partisipasi tenaga kerja/TPAK menunjukkan hubungan negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi positif adalah kinerja regional yang menjadi target bagi pemerintah. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Pertumbuhan ekonomi positif dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang lebih tinggi pada periode saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Munandar, 2017). Menurut Mankiw (2003),



Gambar 1. Tingkat Pertumbuhan PDB Berdasarkan Harga Konstan 2010 (tahun ke tahun) 2016-2021

Sumber: Biro Pusat Statistik Indonesia, 2022.

Gambar 1 menampilkan data PDB Indonesia berdasarkan 17 sektor bisnis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dengan kenaikan sekitar 5% dari 2016 hingga 2019. Namun, pada 2020, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan signifikan sebesar -2,07%, serupa dengan negara-negara lain. Meskipun terjadi pemulihan pada 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,69%, belum mencapai tingkat sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota juga mengalami fenomena serupa.

Dalam konteks teori Keynes, pengeluaran pemerintah, seperti yang tercermin dalam APBD, berperan positif dalam meningkatkan output ekonomi. Kebijakan fiskal, seperti perubahan dalam pendapatan dan belanja pemerintah, dapat mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang diinginkan. Dengan program otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dengan memanfaatkan sumber daya modal dan tenaga kerja secara efektif. Komponen APBD, terutama pendapatan dan belanja pemerintah, menjadi instrumen utama kebijakan fiskal untuk mencapai kemajuan ekonomi yang diinginkan. Pentingnya peran pemerintah dalam mengelola modal dan tenaga kerja melalui kebijakan fiskal tercermin dalam upaya meningkatkan ekonomi regional. Selain itu, Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan bahwa pajak, sebagai sumber pendapatan negara, adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa untuk membangun kemakmuran rakyat sesuai dengan konstitusi.

Teori federalisme fiskal menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi fiskal, seperti yang diungkapkan oleh Wertiandi & Dwirandra (2013). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, setiap wilayah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya keuangannya guna memenuhi kebutuhan lokal. Temuan penelitian Zagler & Dürnecker (2003) menunjukkan bahwa tarif pajak dan kategori pengeluaran pemerintah secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, teori ini mendukung ide bahwa pemberian otonomi keuangan kepada wilayah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan yang efisien dari sumber daya lokal.

Meskipun pajak di Indonesia merupakan sumber utama pendapatan negara, studi penelitian menunjukkan bahwa peran pajak daerah masih kurang efektif sebagai sumber pendapatan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah seperti pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain yang sah. PAD dianggap sebagai variabel kritis yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Studi tersebut juga memfokuskan perhatian pada variabel fiskal pengeluaran, khususnya belanja pemerintah yang terbagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung dalam struktur APBD. Belanja daerah didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan dari nilai kekayaan dan digunakan untuk implementasi operasional serta program kerja dalam satu tahun fiskal. Pentingnya peran belanja pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi diuji berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Beberapa studi, seperti Modebe dkk., (2012) dan Fajri (2016), menemukan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria dan Pulau Sumatera, Indonesia. Namun, penelitian lain, seperti Nurmainah (2013) dan Sularso & Restianto (2012) serta Priambodo (2015) dalam konteks penelitian di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Jika PAD dan belanja pemerintah dilihat sebagai komponen modal dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peneliti juga akan mengkaji dana perimbangan sebagai proyeksi transfer modal dari pemerintah pusat ke daerah. Sebagai bentuk dukungan untuk implementasi otonomi daerah, pemerintah pusat menerapkan kebijakan melalui dana perimbangan, yang merupakan instrumen untuk menutup kesenjangan fiskal antar daerah yang tidak dapat dibiayai oleh PAD. Variabel ini didasarkan pada perhitungan awal peneliti, yang menyatakan bahwa rasio dana perimbangan kabupaten/kota tahun 2015-2020, rata-rata, lebih dari 70% dari total pendapatan daerah.

Penelitian tentang variabel fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih dilakukan antar daerah dengan hasil yang signifikan. Dari penelitian Sularso & Restianto (2012), Haryanto (2013), dan Nurmainah (2013) di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, penelitian Kusumawati & Wiksuana (2018) di Provinsi Bali. Keterbatasan penelitian sebelumnya diselesaikan dalam penelitian ini dengan menggunakan semua kabupaten/kota di Indonesia. Ini menunjukkan perlunya studi tentang pengaruh variabel fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi daerah dipandang sebagai hasil kegiatan daerah, dan peneliti juga menggunakan variabel tenaga kerja untuk melengkapi teori Robert Solow. Tujuan penelitian adalah menganalisis pertumbuhan ekonomi sebagai hasil produktivitas daerah, di mana peran instrumen fiskal adalah PAD, belanja pemerintah, dana perimbangan sebagai proyeksi modal, dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai proyeksi tenaga kerja. Untuk menjawab tujuan penelitian, terdapat lima permasalahan penelitian yang dihasilkan: Apakah variabel pertumbuhan PDB pada periode sebelumnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini? Apakah variabel pendapatan daerah (PAD) memengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini? Apakah variabel belanja langsung pemerintah memengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini? Apakah variabel dana perimbangan memengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini? dan, Apakah variabel partisipasi tenaga kerja memengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini?

Pertanyaan penelitian didasarkan pada asumsi utama bahwa pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Asumsi ini didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Qamar dkk., (2020); Kim dkk., (2021); Nabieu dkk., (2021); Kaharudin & Ab-Rahman (2022); dan Tendengu dkk., (2022) yang memproyeksikan peran pemerintah menggunakan variabel fiskal di berbagai negara. Studi ini melengkapi penelitian sebelumnya di Indonesia, yang masih difokuskan pada beberapa kabupaten/kota tertentu, sehingga hasilnya tidak dapat menjawab apakah variabel fiskal memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada akhirnya, temuan penelitian dapat relevan untuk kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dengan data seri untuk tahun 2015-2020, dan mencakup 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Data untuk tahun 2021 tidak digunakan dalam penelitian ini karena publikasi data sekunder belum lengkap. Namun, jumlah kabupaten/kota akan difilter berdasarkan kelengkapan data. Data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi dari data *cross-section* dan *time series* (Gujarati, 2007). Peneliti menghilangkan daerah-daerah dengan data yang tidak lengkap sehingga hanya menggunakan 497 wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, jumlah ini masih mencakup lebih dari 95% dari wilayah di Indonesia. Penelitian pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menggunakan alat analisis regresi berganda dan data panel untuk menghasilkan temuan atau kebijakan yang direkomendasikan berdasarkan analisis model statis. Kelemahan metode ini adalah bahwa alat analisis tidak dapat mengakomodasi sifat variabel ekonomi, yang pada umumnya bersifat



dinamis, di mana nilai suatu variabel tidak hanya ditentukan oleh nilai variabel lain tetapi juga dipengaruhi oleh variabel itu sendiri di masa lalu.

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dianalisis adalah rasio pertumbuhan pajak daerah, kontribusi pengeluaran langsung terhadap total pengeluaran pemerintah daerah, dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah, dan TPAK. Struktur data panel ini akan dianalisis menggunakan Metode Kuadrat Terkecil Biasa (OLS), yang dikenal sebagai regresi data panel dinamis. Regresi data dinamis adalah metode regresi dengan penambahan unsur lag dalam variabel dependen yang akan digunakan sebagai variabel independen. Model umum regresi data panel dinamis adalah sebagai berikut:

$$y_{i,t} = \alpha + \delta y_{i,t-1} + x_{i,t}' \beta + \epsilon_{i,t} \dots(1)$$

Di mana i adalah 1, 2, ..., n , yang menunjukkan kabupaten dan kota yang berjumlah 497 wilayah, dan t adalah 1, 2, ..., T untuk enam tahun. $y_{i,t}$ menyatakan unit observasi dari variabel dependennya pada periode ke- t . Parameter berikut ini digunakan: α adalah konstanta; δ adalah koefisien lag dari variabel dependen; $y_{i,t-1}$ adalah lag dari variabel independen; $x_{i,t}'$ adalah vektor observasi variabel independen; β adalah koefisien dari vektor variabel independen; dan $\epsilon_{i,t}$ adalah istilah kesalahan.

Pada Model 1, persamaan masih mengandung bias yang terjadi karena korelasi antara efek tetap dan lag variabel dependennya. Untuk mengatasi masalah perbedaan ini, teknik digunakan untuk menghilangkan efek tetap yang disebutkan dalam persamaan berikut:

$$y_{i,t} - y_{i,t-1} = \delta(y_{i,t-1} - y_{i,t-2}) + \beta(x_{i,t} - x_{i,t-1})(\epsilon_{i,t} - \epsilon_{i,t-1}) \dots(2)$$

Meskipun beberapa masalah telah diatasi, masih ada bias yang terkait dengan korelasi antara y_i , $y_{i,t-1} - y_{i,t-2}$ dan $\epsilon_{i,t} - \epsilon_{i,t-1}$, serta masalah endogenitas yang mungkin terjadi akibat hubungan timbal balik. Oleh karena itu, untuk alasan ini, estimasi Metode Momen Umum (GMM), sebagaimana yang direkomendasikan oleh Arellano & Bond, digunakan.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Estimasi model regresi data panel dinamis dengan pendekatan *First Difference*-GMM dan *Sys GMM*. Selanjutnya, pengujian spesifikasi model dengan metode *Arellano-Bond* dan Uji Sargan dilakukan, dan model terbaik ditentukan. Kemudian, fokus pada uji signifikansi parameter untuk interpretasi hasil. Berdasarkan teori dan studi empiris, model yang dirancang dalam penelitian ini adalah:

$$GDPGrowth_{i,t} = \delta(GDPGrowth_{i,t-1} - GDPGrowth_{i,t-2}) + \beta(x_{i,t}) + (\epsilon_{i,t} - \epsilon_{i,t-1}) \dots(3)$$

Dalam rumus di atas $GDPGrowth_{i,t}$ adalah pertumbuhan ekonomi pada periode saat ini, $GDPGrowth_{i,t-1}$

adalah pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya, dan $x_{i,t}$ adalah vektor variabel independen, termasuk pendapatan daerah, pengeluaran langsung pemerintah, dana perimbangan, dan partisipasi tenaga kerja.

Setelah peneliti menemukan model, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dioperasionalisasikan. Pertumbuhan ekonomi (Y) diartikan sebagai peningkatan aktivitas dalam ekonomi daerah yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat meningkat, dan pada akhirnya akan menciptakan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan produksi fisik barang dan jasa dalam batas waktu tahun fiskal. Indikator dalam mengetahui kondisi ekonomi suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di tingkat kabupaten/kota, ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan ekonomi regional dengan mengukur pertumbuhan PDRB dilakukan berdasarkan harga konstan tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel fiskal independen, yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), kontribusi dana perimbangan, dan tenaga kerja. PAD, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, merupakan pendapatan daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah. Peneliti menghitung pertumbuhan tahunan PAD untuk mengurangi korelasi antara pajak, pengeluaran pemerintah, dan kontribusi pengeluaran langsung. Pengeluaran pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, melibatkan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih pada periode fiskal. Alokasi pengeluaran, baik langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kebutuhan administrasi daerah untuk operasional pemerintahan, pembayaran gaji, fasilitas, infrastruktur, dan penyediaan infrastruktur publik. Pengadaan aset tetap dilakukan setiap tahun sesuai dengan prioritas anggaran dan layanan publik, namun belanja modal cenderung tidak dapat dianggarkan dari PAD.

Dana perimbangan, sejak diimplementasikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, telah menjadi pilar utama dalam mendukung otonomi daerah dengan mengalokasikan sumber daya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana daerah dapat mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan dana perimbangan ini. Sementara itu, variabel tenaga kerja, yang dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan pentingnya peran tenaga kerja dalam proses produksi. Penelitian ini mencoba menguji dampak variabel seperti pertumbuhan GDP sebelumnya, pendapatan daerah, pengeluaran langsung pemerintah, dana perimbangan, dan partisipasi tenaga kerja terhadap pertumbuhan GDP pada periode tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, analisis mendalam tentang alokasi dana perimbangan, transparansi penggunaannya, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi esensial. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan wawasan holistik terhadap faktor-faktor kunci, tetapi juga merangsang diskusi kebijakan yang lebih mendalam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji akar tunggal dilakukan untuk menentukan apakah data penelitian bersifat stasioner. Salah satu persyaratan untuk analisis deret waktu, seperti pada data *autoregresi vektor panel* (PVAR), adalah bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam studi tersebut harus bersifat stasioner atau tidak memiliki akar tunggal. Stasioneritas data penting untuk menghindari regresi semu, di mana hasil regresi menunjukkan koefisien yang secara statistik signifikan dan tingginya koefisien determinasi, tetapi hubungan antara variabel-variabel dalam model tidak saling terhubung. Beberapa tes dapat digunakan untuk menentukan stasioneritas data, tetapi studi ini hanya menyajikan hasil dari dua tes, yaitu tes *Levin-Lin-Chu* (LLC) dan tes *Im-Pesaran-Shin* (IPS) dalam tabel 1. Tujuan penggunaan kedua tes ini adalah untuk memastikan konsistensi hasil uji. Hasil uji dengan menggunakan *Levin-Lin-Chu* (LLC) menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam studi tidak memiliki masalah stasioneritas, sementara hasil uji dengan metode ImPesaran-Shin (IPS) menunjukkan bahwa satu variabel memiliki data yang tidak stasioner. Namun, analisis lebih lanjut masih dapat dilakukan dengan merujuk pada hasil uji LLC.

Tabel 1. Uji Akar Tunggal Panel Menggunakan Dua Metode: LLC dan IPS

Variabel	Levin-Lin-Chu (LLC)	Im-Pesaran-Shin
Pertumbuhan ekonomi	-1.5e+02 (0.0000)	25.4201 (1.0000)
Pertumbuhan (PAD)	-2.6e+02 (0.0000)	-14.175 (0.0000)
Kontribusi belanja langsung	-75.8178 (0.0000)	-5.9954 (0.0000)
Kontribusi terhadap dana penyeimbang	-43.2937 (0.0000)	-5.1953 (0.0000)
LFPR	-1.3e+02 (0.0000)	-2.9428 (0.0016)

Sumber: Data yang Diproses, 2023

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, model data panel pertumbuhan ekonomi adalah model dinamis, yang berarti terdapat variabel lag dari variabel dependen yang menjadi regresor/variabel independen. Selain itu, penggunaan model data panel statis tidak memungkinkan kita untuk melihat bagaimana variabel lag menyatu ke dalam model. Oleh karena itu, analisis dengan model GMM dianggap perlu dilakukan. Sebelum memutuskan untuk menggunakan pendekatan GMM, analisis data panel statis pertama-tama dilakukan, baik dengan metode efek umum (*pooled/PLS*) maupun model efek tetap (FEM).

Hasil uji spesifikasi menggunakan data panel statis FEM menunjukkan bahwa variabel lag pertumbuhan ekonomi (*peL1*), kontribusi belanja langsung (*r_bl*), dan kontribusi dana penyeimbang (*r_dp*) secara statistik signifikan dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi (*pe*). Sementara itu, variabel lain seperti pertumbuhan PAD (*p_pad*) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (*tpak*) tidak signifikan secara statistik terhadap perubahan yang terjadi pada variabel pertumbuhan ekonomi (*pe*). Hal lain yang dapat ditunjukkan dari analisis model FEM adalah indikasi konvergensi dalam model, yang terlihat pada nilai koefisien lag pertumbuhan ekonomi, yang secara statistik signifikan dengan alpha sebesar 1%.

Tabel 2. Spesifikasi Model Data Panel Statis

Variabel	Fixed Effect Model (FEM)	Pooled Least Square (PLS)
<i>peL1</i>	-.21758745*** (.017395) [-12.51]	-.090697*** (.0161257) [-5.62]
<i>p_pad</i>	.0453377 (.0330467) [1.37]	.04131086 (.0316816) [1.30]
<i>r_bl</i>	.67593813* (.3124598) [2.16]	.19393823 (.1586246) [1.22]
<i>r_dp</i>	.75324349 * (.3226561) [2:33]	-.09286247 (.1301999) [-0.71]
Partisipasi dalam dunia kerja	-.00022221 (.0043163) [-0.05]	-.00238309 (.0020276) [-1.18]
observasi	2485	2485
R-squared	0010	0014
F-test	1.44	7.32
	0.0000	0.0000
Total area	497	497

Catatan: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Angka dalam tanda kurung adalah kesalahan standar dari variabel regresor, dan angka dalam kurung siku adalah statistik t untuk FEM dan PLS.

Sumber: Data yang diolah, 2023



Uji dilakukan karena dampak perubahan satu variabel terhadap variabel lain tidak selalu terjadi dalam periode tahun yang sama tetapi dapat terjadi dalam periode tahun yang berbeda. Berbeda dengan hasil estimasi model menggunakan pendekatan PLS, tabel 3, kolom 3 menunjukkan bahwa ada satu variabel yang signifikan menjelaskan perubahan pada variabel pertumbuhan ekonomi (pe), yaitu lag dari variabel pertumbuhan ekonomi itu sendiri (peL1). Sementara itu, variabel independen lain seperti kontribusi belanja langsung (r_bl), kontribusi dana perimbangan (r_dp), pertumbuhan PAD (p_pad), dan tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) tidak secara statistik signifikan dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Dua jenis analisis dapat dilakukan menggunakan pendekatan GMM: pendekatan first difference GMM (fdgmm) dan pendekatan GMM sistem (sysgmm). Kedua pendekatan ini secara teknis bergantung pada koefisien yang dihasilkan dari estimasi fdgmm. Jika koefisien fdgmm berada antara nilai koefisien FEM dan PLS atau dekat dengan nilai koefisien FEM, dapat dianggap menggunakan pendekatan GMM sistem. Sebagai langkah awal, hasil regresi menggunakan model GMM dapat dilihat dalam tabel 3, di mana terdapat koefisien yang diestimasi untuk setiap variabel penelitian dan uji kelayakan model.

Salah satu dasar penggunaan model GMM di sini adalah sifat dinamis dari variabel dependen, di mana estimasi data panel statis sebelumnya ditunjukkan dari signifikansi lag variabel dependen yang diestimasi sebagai variabel independen, serta konvergensinya. Interpretasi model GMM dilakukan setelah pertama-tama menguji kebaikan model, yang terdiri dari pengujian validitas instrumen, pengujian konsistensi, dan pengujian ketidakkenalan. Hasil estimasi koefisien model dan uji kebaikan dapat dilihat dalam tabel 3. Pengujian validitas instrumen dilakukan menggunakan uji Sargan dengan H_0 diharapkan valid, sedangkan pengujian konsistensi diperiksa dengan menggunakan uji Arellano-Bond (AR) dengan hipotesis nol tanpa autokorelasi. Dalam uji AR, nilai signifikansi dari urutan kedua harus dipertimbangkan dengan mengharapkan penolakan H_0 . Pemeriksaan ketiga adalah uji goodness-of-fit, yang membandingkan nilai koefisien yang dihasilkan dari estimasi first difference GMM (fdgmm) dengan koefisien yang diestimasi dari FEM. Jika koefisien FDGMM berada antara nilai koefisien FEM dan PLS atau dekat dengan koefisien yang diperoleh dari model FEM, persyaratan tidak biasa model tersebut terpenuhi.

Tabel 3. Spesifikasi Model Dinamis Menggunakan FDGMM dan SYSGMM

Variabel	First Difference FDGMM	SYS GMM
peL1	-.0834798 *** (.0217716) [-3.83]	-.07622897 *** (.0156711) [-4.86]
p_pad	.0459168 (.0243432) [1.89]	.04451204 (.037289) [1.19]
r_bl	.89738262** (.295421) [3.04]	.87744411** (.3933395) [2.23]
r_dp	.10502546 (.4464924) [0.24]	.0002565 (.4136448) [0.00]
Tpak	-.00215914 (.0025458) [-0.85]	-.00247298 (.0050552) [-0.49]
Uji Sargan	11.45628 0.2457	14.09521 0.3672
AB test AR(1)	-2.7996* 0.0051	-2.7813* 0.0054
AB test AR(2)	-.5408 0.5886	-.36893 0.7122
Total area	497	497

Catatan: * $p<0,05$; ** $p<0,01$; *** $p<0,001$

Angka dalam tanda kurung adalah kesalahan standar dari variabel regresor, dan angka dalam kurung siku adalah statistik z untuk FDGMM dan SYSGMM.

Sumber: Data yang diolah, 2023

Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi untuk pendekatan FDGMM dan SYSGMM serta uji goodness-of-fit untuk kedua pendekatan tersebut. Dalam pendekatan FDGMM pada kolom 2, uji validitas instrumen yang ditunjukkan oleh uji Sargan menunjukkan nilai statistik chi-square 2 sebesar 11.45628 dengan nilai p sebesar 0.2457. Nilai p yang lebih signifikan daripada alpha 0,05 diinterpretasikan sebagai penerimaan H_0 yang menyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam model secara keseluruhan FDGMM valid. Uji goodness-of-fit berikutnya untuk model adalah uji konsistensi yang diperoleh dari hasil uji Arellano-Bond dan diketahui dari nilai p untuk gangguan autocorrelation orde pertama dan kedua. Pada AR(1) orde pertama umumnya menolak H_0 , sementara nilai pada AR(2) orde kedua menjadi fokus penentuan apakah suatu model konsisten. Dalam pendekatan FDGMM, AR(1) signifikan dengan skor z statistik -2.7996 dan nilai p 0.0051, sedangkan statistik z AR(2) bernilai -0.5408 dan tidak signifikan dengan nilai p 0.5886. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan FDGMM dalam penelitian ini secara statistik terbukti konsisten dan



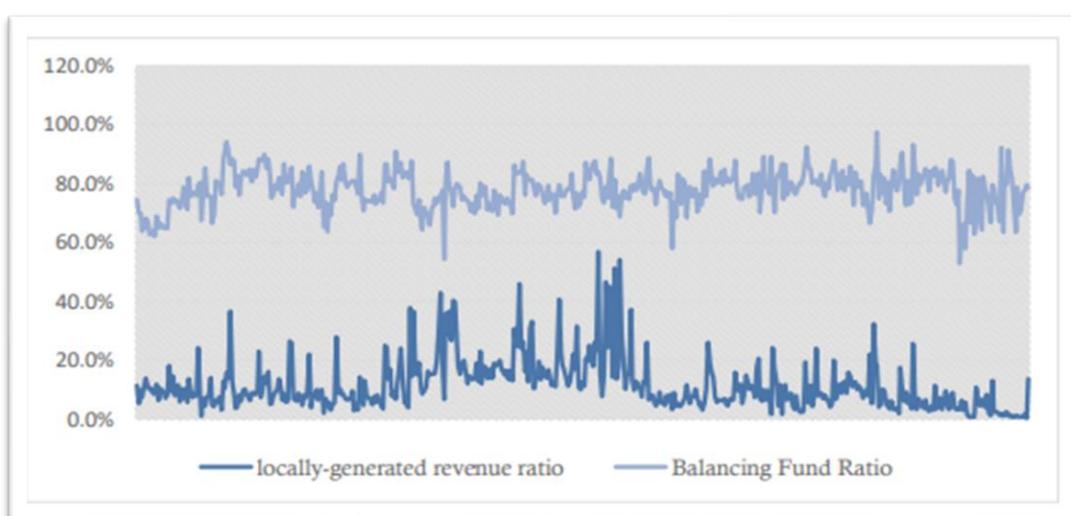
bebas dari masalah serial *autocorrelation*. Uji *goodness-of-fit* ketiga untuk model adalah ketidaksanggahan yang diketahui dari perbandingan antara nilai koefisien yang dihasilkan dari estimasi *first difference* GMM (FDGMM) dan koefisien yang diestimasi dari FEM. Dalam model FDGMM, koefisien yang diperoleh dari hasil estimasi adalah -0.0834798 dan tidak berada antara koefisien dari dua pendekatan lainnya atau dekat dengan nilai koefisien FEM. Dengan demikian, model FDGMM tidak bebas dari masalah ketidaksanggahan.

Mirip dengan pendekatan FDGMM, pendekatan SYSGMM juga menunjukkan hasil uji kebaikan penyusuaian yang tidak jauh berbeda dari pendekatan sebelumnya. Hasil estimasi pendekatan model SYSGMM dapat dilihat pada tabel 3, kolom 3, di mana uji kebaikan model pertama, yaitu validitas instrumen, menunjukkan hasil yang diharapkan. Uji Sargan menunjukkan validitas instrumen dengan nilai statistik chi-square 2 sebesar 14.09521 dan nilai p sebesar 0.367211. Nilai p lebih signifikan daripada alpha 0.05 diinterpretasikan sebagai penerimaan H0 yang menyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam model SYSGMM secara keseluruhan valid.

Uji kebaikan model berikutnya adalah uji konsistensi yang diperoleh dari hasil uji *Arellano-Bond* dan diketahui dari nilai p untuk gangguan yang terkorelasi otonomi tingkat pertama dan kedua. Seperti yang diharapkan, hipotesis yang diharapkan dalam uji ini adalah penolakan H0, tetapi seperti yang diharapkan sebelumnya, nilai p pada AR(1) tingkat pertama signifikan, dan nilai p pada AR(2) tingkat kedua tidak signifikan. Dalam pendekatan SYSGMM, AR(1) signifikan dengan skor z statistik -2.7813 dan nilai p 0.0054, sementara statistik z AR(2) bernilai -0.36893 dengan nilai p 0.7122. Dengan demikian, pendekatan SYSGMM dalam penelitian ini secara statistik terbukti konsisten dan bebas dari masalah otonomi seri autokorelasi.

Peneliti menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun t. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator peningkatan kapasitas regional. Pertumbuhan ekonomi terkait dengan banyak variabel yang memengaruhinya. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas regional tidak dapat dipisahkan dari kinerja regional pada tahun sebelumnya. Pengukuran yang dilakukan oleh peneliti menggunakan variabel lag selama satu tahun. Namun, temuan empiris tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya terhadap wilayah di Indonesia memiliki parameter koefisien negatif, dengan nilai 0.0834798. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan positif sebesar 1% pada ekonomi regional akan memiliki dampak negatif sebesar 0.0834798 pada ekonomi regional pada tahun berikutnya. Meskipun tidak banyak penelitian sebelumnya yang mengonfirmasi temuan ini, aktivitas ekonomi regional masih menjadi beban untuk meningkatkan aktivitas ekonomi untuk periode berikutnya.

Modal dan tenaga kerja diasumsikan sebagai bentuk produktivitas regional dan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dalam penggunaan modal dengan proyeksi pada variabel pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Asumsi yang dibangun adalah bahwa pengeluaran produktif dan tidak produktif yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan. Pendapatan dianggap sebagai potensi keuangan, sehingga peneliti menggunakan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi dana perimbangan. Namun, pertumbuhan PAD dan kontribusi dana perimbangan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi apa pun. Hasil penelitian sebelumnya di Manado, Indonesia (Momuat, 2013) menunjukkan bahwa PAD dan lapangan kerja erat dan signifikan terkait. Penelitian ini dilakukan di kota Manado. Hasil ini berbanding terbalik dengan bukti empiris pada data panel di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh peneliti.



Gambar 2. Distribusi Rasio (PAD) dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020
Sumber: Data yang diolah, 2023

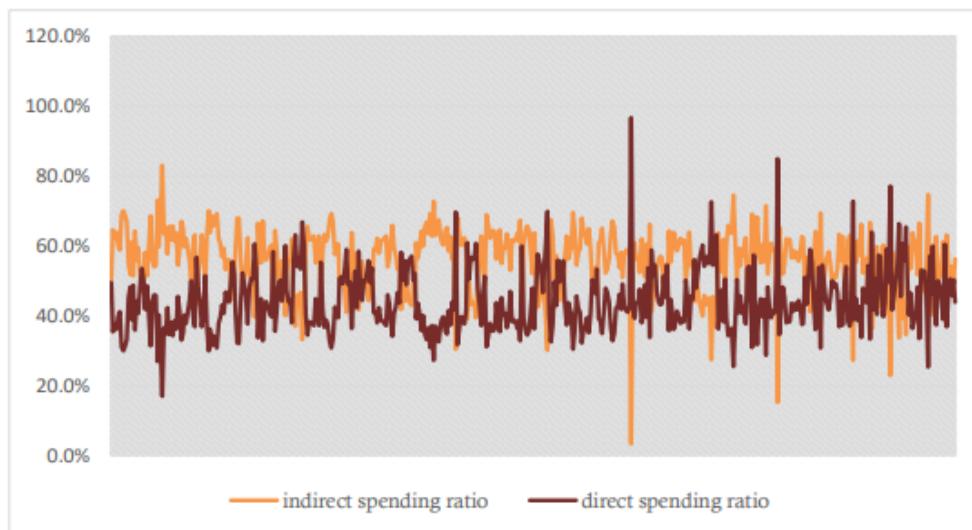
Gambar 2 menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi dana perimbangan. Secara rata-rata, kontribusi PAD pada tahun 2020 masih kurang dari 20% jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Daerah belum mampu mengoptimalkan potensi daerah untuk menciptakan pendapatan lokal.

Keuangan pemerintah daerah masih didukung oleh transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang akan digunakan oleh daerah untuk pelaksanaan operasional dan program kerja. Dana perimbangan memberikan lebih banyak ruang bagi daerah untuk membiayai pengeluaran yang telah diprogramkan. Jika pendapatan daerah meningkat, diharapkan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kontribusi dana perimbangan tidak dapat dikategorikan sebagai potensi keuangan daerah karena variabel ini adalah ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

Temuan mengenai pengaruh pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan 497 kabupaten/kota di Indonesia tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di DKI Jakarta (Yurianto & Akhmad, 2021), serta penelitian di Kota Palangkaraya oleh Nasution dkk., (2021), yang menguji pengaruh pajak. Namun, temuan peneliti sama dengan hasil penelitian di 48 negara di mana pajak tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan memiliki dampak pada penurunan pendapatan per kapita.

Hasil yang ditemukan oleh peneliti menyatakan bahwa pertumbuhan PAD dan kontribusi dana perimbangan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan pola hubungan positif. Oleh karena itu, peneliti tidak melakukan diskusi lebih lanjut tentang nilai parameter koefisien pertumbuhan PAD dan kontribusi dana perimbangan. Rasio realisasi pendapatan daerah tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat fleksibel dalam pembentukannya. Peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu daerah belum dapat dipengaruhi oleh rasio pendapatan pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa peran kebijakan fiskal dalam hal pendapatan, baik pendapatan lokal maupun pendapatan dari transfer pemerintah pusat, belum dialokasikan secara langsung untuk agenda peningkatan aktivitas ekonomi daerah pada tahun yang sama. Potensi keuangan dari sisi pendapatan masih beberapa dana dan belum mampu menjalankan fungsinya sebagai pendorong ekonomi daerah. Modal didefinisikan sebagai beberapa dana untuk pembiayaan kegiatan produksi sehingga pertumbuhan PAD dan kontribusi dana perimbangan belum diarahkan ke sektor produksi daerah.

Kontribusi pengeluaran langsung berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi, dengan parameter koefisien positif sebesar 0.89738262. Angka ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan rasio pengeluaran langsung sebesar 1%, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.89738262%. Nilai ini relatif tinggi untuk pembentukan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haryanto (2013), dengan pendekatan FEM menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di Jawa Tengah memiliki efek langsung pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun beberapa studi regional menemukan bahwa tidak ada efek pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap kabupaten dan kota di Indonesia, peneliti menemukan bahwa pengeluaran pemerintah rutin secara konsisten memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan umum di Indonesia masih bersifat ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif didefinisikan sebagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari sektor pengelolaan APBD untuk meningkatkan baik pengeluaran langsung maupun tidak langsung. Ini juga dapat berarti bahwa pemerintah dapat mengurangi pajak untuk meningkatkan permintaan agregat oleh masyarakat di suatu daerah. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto daerah dan mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, di mana pengeluaran pemerintah masih lebih tinggi daripada pendapatan. Ini berarti bahwa sektor konsumsi (pengeluaran) masih menjadi motor penggerak di balik penciptaan pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 3. Distribusi Rasio Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020

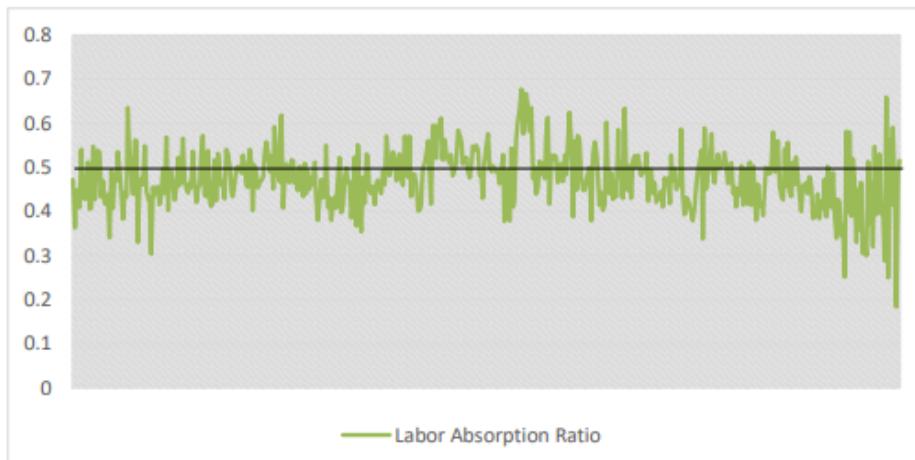
Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan program dan aktivitas, pengeluaran daerah dikelompokkan menjadi dua jenis: pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung. Ada komponen pengeluaran pembiayaan jika terdapat selisih kelebihan antara pengeluaran daerah dan pendapatan. Pengeluaran langsung didefinisikan sebagai komponen pengeluaran pemerintah yang

dianggarkan secara langsung untuk pelaksanaan program dan aktivitas terkait kegiatan pemerintah daerah. Sementara itu, pengeluaran tidak langsung adalah komponen dari program pemerintah, dan pengeluaran kegiatan yang tidak terkait secara langsung, atau pengeluaran ini dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Contoh pengeluaran tidak langsung meliputi pengeluaran personel (gaji, hibah, honorarium), bantuan sosial, barang dan jasa, dan pengeluaran modal.

Gambar 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, rasio pengeluaran tidak langsung masih lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Peneliti tidak memeriksa setiap komponen pengeluaran tidak langsung, tetapi pengeluaran pemerintah dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran daerah bertujuan untuk memajukan daerah, menciptakan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin besar pendapatan daerah yang dapat diperoleh, semakin mampu dan mandiri daerah dalam membiayai pengeluaran daerahnya.

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki koefisien negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang dilihat sebagai input telah melewati titik impas produksi. Di mana penambahan input akan mengurangi output yang diperoleh. Temuan empiris ini sejalan dengan penelitian di Jawa Timur oleh Rofii (2017) dan penelitian di Jawa Tengah dalam penelitian Hidayah (2017), yang menyatakan bahwa tenaga kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. David Ricardo berargumen bahwa pertumbuhan populasi yang luar biasa akan menghasilkan banyak pekerja, sehingga upah menurun dan ekonomi menjadi stagnan (Lestari, 2019). Peneliti menunjukkan kemungkinan ini karena di Indonesia, jumlah pekerja tidak terampil lebih besar daripada jumlah pekerja terampil, atau peningkatan proporsional tidak mengikuti kelebihan jumlah pekerja dalam produktivitas regional.



Gambar 4. Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020
Sumber: Data yang diolah, 2023

Daerah yang dilengkapi dengan pekerja terampil membawa potensi modal manusia yang vital untuk meningkatkan produktivitas regional. Pekerja terampil, terutama yang berada dalam rentang usia produktif 15-64 tahun, menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, memainkan peran kunci dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah. Semakin banyak individu yang berada dalam kategori usia produktif ini, semakin besar kontribusi potensial terhadap perkembangan ekonomi regional. Ini karena kelompok penduduk di luar rentang usia tersebut akan menjadi tanggung jawab populasi usia produktif.

Untuk memahami dinamika ini, peneliti melakukan perbandingan antara data populasi dan data tenaga kerja, sebagaimana tercermin dalam Gambar 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari populasi Indonesia yang aktif terlibat dalam peluang pekerjaan yang tersedia. Pada tahun 2020, sekitar 52,47% dari populasi Indonesia tidak termasuk dalam kategori tenaga kerja yang sedang bekerja, berdasarkan data BPS yang telah diolah. Temuan ini menegaskan kecurigaan bahwa variabel tenaga kerja mungkin tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketika sebagian besar populasi tidak terlibat dalam kegiatan pekerjaan, potensi sumber daya manusia tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Hal ini menyoroti bahwa perlu diberikan perhatian khusus pada peningkatan partisipasi tenaga kerja dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan keterlibatan tenaga kerja serta pengembangan keterampilan yang relevan untuk memaksimalkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut..

KESIMPULAN

Ada efek signifikan antara pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dan pengeluaran langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia masih memerlukan kebijakan ekspansif. Selain itu, peneliti tidak menemukan bukti empiris dari pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (LFPR) terhadap pertumbuhan ekonomi. Wilayah dan pendapatan dari transfer yang diperoleh dari wilayah tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam tahun fiskal yang sama. Peneliti merekomendasikan penggunaan variabel jeda untuk penelitian lebih lanjut. Sementara itu, ketiadaan pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hubungan antagonis menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja di Indonesia telah melebihi batas produktivitas. Pembatasan studi yang perlu direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut adalah bahwa peneliti belum mengukur pengaruh variabel fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam keberadaan variabel pemoderasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Tendengu, S., Kapingura, F. M., & Tsegaye, A. (2022). Fiscal Policy and Economic Growth in South Africa. *Economies*, 10(9), 204. <https://doi.org/10.3390/economies10090204>.
- Wertianti, I., & Dwirandra, A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 567–584.
- Yurianto, Y., & Akhmad, T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economics)*, 7(4), 436–449.
- Nasution, D. P., Afifuddin, S., Irsad, I., & Rahmanta, R. (2021). Analysis of Small Micro Business Sector on the Welfare of Small Micro Enterprises in North Sumatra. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 5066–5079.
- Nabieu, G. A. A., Bokpin, G. A., Osei, A. K., & Asuming, P. O. (2021). Fiscal Rules, Fiscal Performance, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa. *African Development Review*, 33(4), 607–619. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12595>.
- Amri, K. (2020). Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(1), 1–18.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- Hidayah, E. N. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerja, dan UMK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Tahun 2010-2014).
- Gujarati, D. N. (2007). Dasar-dasar Ekonometrika.
- Kim, J., Wang, M., Park, D., & Petalcorin, C. C. (2021). Fiscal Policy and Economic Growth: Some Evidence from China. *Review of World Economics*, 157(3), 555–582. <https://doi.org/10.1007/s10290-021-00414-5>
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592.
- Lestari, U. S. (2019). Analisis Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Studi Literatur. *Universitas Andalas*.
- Wang, L., & Jones, M. K. (2018). The Impact of Technology on Economic Growth. *Journal of Economic Studies*, 45(2), 123–145. <https://doi.org/10.1080/01292986.2018.1459876>
- Garcia, R., & Martinez, A. B. (2019). Globalization and Its Effects on Income Inequality. *International Journal of Economics and Finance*, 11(5), 87–103. <https://doi.org/10.5539/ijef.v11n5p87>

